



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF

**LEMBAGA** : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN  
PELABUHAN BEBAS BATAM

**UNIT KERJA** : ANGGOTA BIDANG KEBIJAKAN STRATEGIS

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SYLVIA JEANNETTE MALAIHOLLO
2. Jabatan : KEPALA PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI
3. NHK : 750562

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 2.375.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 153 m2/65 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 182 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 74 m2/74 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. ----

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 48.000.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. 690.590.200

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 1.502.321.676

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. 532.292.037

**Sub Total**

Rp. 5.148.203.913

**III. HUTANG**

Rp. 63.514.630

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 5.084.689.283

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.